



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YFR. HERMIYANA
2. Jabatan : TENAGA PENGAJI
3. NHK : 123891

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.576.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/242 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.899.000.000
4. Tanah Seluas 278 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.601.000.000
5. Tanah Seluas 384 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 271.000.000
6. Tanah Seluas 418 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 294.500.000
7. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 545.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **176.955.000**

1. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.050.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.880.000



3. MOBIL, SUZUKI XL 7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
23.025.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 128.802.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 368.062.341

F. HARTA LAINNYA Rp. 364.453.349

Sub Total Rp. 7.614.272.690

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.614.272.690

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.